

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Aminudin, *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*, Kanisius, Semarang, 2007.
- Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- C.F.Strong, *Modern Political Constitution*, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1996.
- Chtistine ST Kansil, *Modul hukum administrasi negara C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010.
- Eko Budiharjo. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State* “Sociological Introduction, California: Standford University Press, 1992.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hendrawan, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, 2009.
- Lutffi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959.

- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata, Jakarta, 2013.
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, cet. Ke-1, Jakarta, 1983.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- \_\_\_\_\_, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban*, Jakarta, 2007.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Yudishtira, Jakarta, 1994
- R. Serfianto Dibyo Purnomo; Iswi Hariyani; Cita Yustisia, *Kitab Hukum Bisnis Properti*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yograkarta, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Saiful Anwar. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gloria Madani Press, Jakarta, 2004.
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 2000.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sugijanto Soegijoko, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005.

Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993.

## **B. Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.

## **C. Sumber Lain**

Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Panduan Penulisan Hukum*, Bandung, 2011.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

<http://blog.urbanindo.com/2015/07/8-izin-perumahan/>, diakses tgl 1 Agustus 2016 pukul 20:00 WIB.